



GUNTUR AGA TIRTANA/RADAR JOGJA

KECEWA: Suasana TKP Abu Bakar Ali, Jogja, kemarin (12/4). Juru parkir, pedagang, hingga petugas kebersihan menolak rencana pembongkaran TKP Abu Bakar Ali karena mereka menggantungkan hidup dari kantor parkir tersebut.

Jukir dan Pedagang Kecewa Sikap Pemprov

Tak Pernah Diberi Tahu, Pedagang dan Jukir Tolak Pembongkaran TKP ABA

JOGJA – Para pedagang, juru parkir (jukir), hingga pelaku usaha di kawasan Tempat Khusus Parkir Abu Bakar Ali (TKP ABA) sepakat menolak rencana pembong-

karan bangunan. Mereka menyayangkan sikap Pemprov DIJ yang tak pernah memberi tahu meski rutin membayar retribusi ■

Baca Jukir... Hal 3



Kami tidak menolak penataan, tapi berharap dapat tempat relokasinya dulu yang sekiranya bisa mempertimbangkan kesejahteraan ekonomi kami."

DONI RULIYANTO, Pengelola TKP ABA

Jukir dan Pedagang Kecewa Sikap Pemprov

Sambungan dari hal 1

Pengelola TKP ABA Doni Ruliyanto mengatakan, para pedagang dan jukir cukup resah terkait rencana itu. Sebab, informasi pembongkaran tidak disampaikan langsung oleh Pemprov DIJ, melainkan diketahui dari pemberitaan di media. "Tahunya malah dari media, setelahnya kami mencari informasi ke Dinas Perhubungan (DIJ)," ungkapnya, Sabtu (12/5).

Dia menyebut, selama ini pedagang membayar retribusi ke Pemprov DIJ setiap tahunnya. Sebelumnya, retribusi dibayarkan kepada Pemkot Jogja. Sejak 2022, pengelolaan area ini memang telah dialihkan dari Pemkot Jogja ke Pemprov DIJ. "Bayarnya itu secara global setiap tahunnya. Tahun 2022 mulai bayar ke Pemprov (DIJ) sebelumnya ke Pemkot (Jogja)," ucap Doni.

Dari hasil audiensi dengan Dinas Perhubungan DIJ, bangunan TKP ABA akan dibongkar setelah masa kontraknya berakhir pada 13 April 2025. Pembongkaran dijadwalkan dimulai pada 14 April 2025. Lokasi tersebut akan dialihfungsikan menjadi ruang terbuka hijau (RTH).

Doni menegaskan, dari hasil konsolidasi yang dilakukan pada Jumat (12/4) malam menunjukkan bahwa para pedagang dan jukir menolak pengusuran dan pembongkaran. Mereka

menyatakan siap bertahan dan tetap menjalankan aktivitas di lokasi tersebut. "Kami tidak menolak penataan, tapi berharap dapat tempat relokasinya dulu yang sekiranya bisa mempertimbangkan kesejahteraan ekonomi kami," tegasnya.

Menurut dia, pembongkaran lokasi parkir berlandaskan tiga itu dinilai bukan solusi terbaik. Sebab akan memberikan dampak bagi ratusan orang yang bakal kehilangan sumber ekonominya itu. "Karena untuk pedagang ini kan jualannya di tempat objek wisata. Lalu, jualan mereka ini hasil dari UMKM. Untuk yang parkir juga, dan tempatnya juga belum tahu," ujar Doni.

Dia menjelaskan, ada sekitar 400 orang yang bergantung hidupnya di lokasi tersebut. Mereka terdiri dari 230 pedagang, 72 juru parkir aktif di bagian atas, serta sekitar 30 orang yang bekerja sebagai jukir, petugas kebersihan, dan keamanan di bagian bawah.

Mereka memutuskan akan tetap berjualan sambil berharap adanya solusi. Berdasarkan hasil audiensi, pedagang memang diberikan tempat relokasi. Namun tempat tersebut adalah tempat transisi. "Pedagang dipindah sementara di Batikan, untuk tempat penggantian juga nggak ada kepastian," katanya.

Dia mengungkapkan, se-

lama masa transisi, para pedagang akan dipindahkan dahulu di Pasar Batikan. Kemudian nanti akan dicarikan tempat penggantinya. "Jukir dan yang ikut dengan saya di kebersihan nanti akan dipecah untuk ditempatkan di parkir tepi jalan umum," ungkapnya.

Koordinator jukir TKP ABA Wito berharap, jika ada relokasi, tempat baru tersebut memungkinkan kelompoknya tetap bekerja. Di TKP ABA ada dua kelompok shift jukir yang berganti setiap harinya. Total anggota di setiap shift mencapai puluhan orang. Dia berharap pemerintah memperhatikan nasib para jukir. "Kalau hari libur pendapatan dari bus luma-yan, kalau motor tetap sama. Rerata per orang Rp 50 ribu per hari," jelasnya.

Wali Kota Jogja Hasto Wardoyo menyatakan, Pemkot Jogja akan membantu para pedagang dan jukir yang terdampak pembongkaran TKP ABA. Saat ini, pihaknya sedang melakukan pemetaan jumlah pedagang dan jukir.

Selain itu, kata Hasto, pemerintah siap memberikan bantuan dan memperhatikan dampak sosial dari relokasi. "Kami akan membantu untuk dampaknya kalau tiba waktunya nanti harus direlokasi. Arahan dari Pak Gubernur (HB X) secara makro bahwa kami harus punya empati kepada yang kena dampak," ucapnya. (tyo/pr/hep)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 25 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005